

Pelaksanaan Layanan Anak Berkebutuhan Khusus Di SMPN 2 Lamongan Dalam Memenuhi Hak Atas Pendidikan

Virta Aprilia Putri

Universitas Negeri Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received June 15, 2025

Revised June 23, 2025

Accepted June 25, 2025

Available online July 03, 2025

Kata Kunci

Pendidikan inklusif, hak atas pendidikan

Keywords

Inclusive education, right to education



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus di SMP Negeri 2 Lamongan sebagai bagian dari upaya mewujudkan hak pendidikan yang setara dan adil. Latar belakang studi ini berangkat dari urgensi perlindungan hak-hak anak yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 mengenai Akomodasi Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Meskipun kebijakan tersebut mendukung pendidikan inklusif, kondisi nyata di sekolah menunjukkan adanya tantangan, seperti kurangnya jumlah guru pendamping khusus, terbatasnya pelatihan bagi tenaga pengajar, serta fasilitas yang belum memadai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan pelaksanaan layanan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus di SMPN 2 Lamongan dan mengidentifikasi sejauh mana hak-hak pendidikan mereka telah dipenuhi berdasarkan prinsip inklusif. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, memanfaatkan metode observasi, wawancara mendalam, serta dokumentasi. Temuan menunjukkan bahwa sekolah telah mulai mengimplementasikan pendidikan inklusif melalui adaptasi kurikulum, serta kerja sama antara guru

umum dan guru pendamping. Lingkungan belajar pun diarahkan agar inklusif dan menghargai keberagaman. Meski demikian, pelaksanaan pendidikan inklusif tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih dijumpai kendala teknis dan keterbatasan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana. Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun sekolah telah menunjukkan keseriusan dalam menjalankan pendidikan inklusif, masih diperlukan dukungan tambahan agar hak-hak pendidikan anak berkebutuhan khusus dapat diwujudkan secara menyeluruh sesuai prinsip-prinsip yang dirumuskan oleh Tomasevski.

ABSTRACT

This study examines the implementation of educational services for children with special needs at SMP Negeri 2 Lamongan as part of an effort to realize equal and fair educational rights. The background of this study is based on the urgency of protecting children's rights as regulated in Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System and Government Regulation Number 13 of 2020 concerning Appropriate Accommodation for Students with Disabilities. Although the policy supports inclusive education, real conditions in schools show challenges, such as the lack of special assistant teachers, limited training for teaching staff, and inadequate facilities. The purpose of this study is to describe the implementation of inclusive education services for children with special needs at SMPN 2 Lamongan and to identify the extent to which their educational rights have been fulfilled based on inclusive principles. The study was conducted using a descriptive qualitative approach, utilizing observation methods, in-depth interviews, and documentation. The findings show that schools have begun implementing inclusive education through curriculum adaptation, as well as collaboration between general teachers and assistant teachers. The learning environment is also directed to be inclusive and respect diversity. However, the implementation of inclusive education has not been fully optimal because there are still technical obstacles and limitations in human resources and facilities and infrastructure. Based on these findings, it can be concluded that although schools have shown seriousness in implementing inclusive education, additional support is still needed so that the educational rights of children with special needs can be realized comprehensively according to the principles formulated by Tomasevski.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara tanpa terkecuali, termasuk bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, penghormatan

terhadap hak-hak asasi manusia diatur dalam berbagai regulasi, seperti UUD 1945 Pasal 28H ayat (2), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang akomodasi layak bagi peserta didik penyandang disabilitas. Peraturan-peraturan ini menegaskan bahwa setiap anak, termasuk yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, atau emosional, berhak mendapatkan layanan pendidikan yang layak, tanpa diskriminasi.

Pendidikan inklusif menjadi salah satu bentuk konkret dari upaya negara dalam memberikan akses pendidikan yang adil bagi semua kalangan, khususnya ABK. Melalui pendidikan inklusif, siswa dengan kebutuhan khusus belajar di sekolah reguler bersama teman-temannya yang lain, dengan dukungan kurikulum dan pendekatan yang disesuaikan. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan hambatan belajar, memperkuat nilai kesetaraan, dan meningkatkan penerimaan sosial. Pemerintah Indonesia juga telah mengatur mekanisme pendidikan inklusif melalui Permendiknas No. 70 Tahun 2009, yang memberikan pedoman bagi sekolah dalam menerima dan mendidik peserta didik berkebutuhan khusus di lingkungan pendidikan umum.

Implementasi pendidikan inklusif di lapangan belum sepenuhnya berjalan optimal. Berbagai tantangan masih ditemukan di sekolah umum yang telah ditetapkan sebagai sekolah inklusi, seperti kurangnya guru pendamping khusus (GPK), minimnya pelatihan guru reguler terkait strategi pembelajaran inklusif, terbatasnya sarana dan prasarana ramah disabilitas, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat dan pihak sekolah terhadap pentingnya inklusi. Hal ini menyebabkan pelayanan pendidikan bagi ABK belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan sebagaimana yang dijanjikan oleh kebijakan.

SMPN 2 Lamongan merupakan salah satu sekolah inklusi yang telah membuka akses bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Sebagai sekolah unggulan di tingkat daerah, SMPN 2 Lamongan memiliki potensi besar untuk menjadi percontohan pelaksanaan pendidikan inklusif. Namun, sejauh mana hak-hak pendidikan bagi ABK benar-benar terpenuhi di sekolah tersebut masih menjadi pertanyaan yang perlu dijawab melalui kajian ilmiah. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk mendeskripsikan secara komprehensif bagaimana implementasi layanan pendidikan bagi ABK di sekolah ini.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan layanan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus di SMPN 2 Lamongan, dengan fokus pada sejauh mana layanan tersebut mampu memenuhi hak atas pendidikan berdasarkan prinsip-prinsip pendidikan inklusif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan kondisi faktual, tetapi juga sebagai bahan evaluatif terhadap efektivitas kebijakan pendidikan inklusif di tingkat sekolah.

Keunggulan penelitian ini (state of the art) terletak pada pendekatannya yang berbasis Hak Asasi Manusia, yaitu dengan menggunakan kerangka analisis dari Katarina Tomasevski yang mencakup empat prinsip utama dalam pemenuhan hak atas pendidikan: availability (tersedia), accessibility (terjangkau), acceptability (diterima), dan adaptability (bisa beradaptasi). Pendekatan ini menjadikan penelitian tidak hanya normatif tetapi juga responsif terhadap kondisi riil peserta didik di lapangan.

Fokus penelitian pada sekolah negeri yang ditetapkan sebagai sekolah inklusi, khususnya di daerah seperti Kabupaten Lamongan, memberikan kontribusi baru dalam memperluas literatur pendidikan inklusif di Indonesia. Masih terbatasnya kajian empiris yang mengevaluasi secara langsung implementasi layanan pendidikan ABK di sekolah umum menjadikan penelitian ini penting dan relevan, baik bagi kalangan akademisi, pembuat kebijakan, maupun praktisi pendidikan. Dengan demikian, skripsi ini berkontribusi dalam mengisi kekosongan literatur lokal mengenai efektivitas layanan pendidikan inklusif, serta mendorong penguatan sistem pendidikan yang lebih inklusif, setara, dan berkeadilan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai pelaksanaan layanan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di SMP Negeri 2 Lamongan. Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin memahami fenomena sosial secara kontekstual dan alamiah, terutama bagaimana sekolah menyelenggarakan pendidikan inklusif berdasarkan pengalaman para pelaku langsung seperti guru, kepala sekolah, orang tua, dan siswa.

Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari tiga metode yaitu yang pertama observasi digunakan untuk mengamati secara langsung interaksi dan aktivitas pembelajaran yang melibatkan siswa ABK di lingkungan sekolah. Kedua, wawancara mendalam dilakukan terhadap informan kunci seperti guru pendamping khusus (GPK), guru kelas, kepala sekolah, dan orang tua siswa ABK untuk menggali informasi, persepsi, serta pengalaman mereka dalam pelaksanaan layanan inklusif. Ketiga, dokumentasi digunakan

untuk mengumpulkan data sekunder berupa kebijakan sekolah, program pembelajaran individual (PPI), catatan administrasi, dan dokumen pendukung lainnya yang relevan.

Instrumen utama penelitian adalah peneliti itu sendiri sebagai instrumen kunci (human instrument), didukung oleh pedoman observasi dan pedoman wawancara sebagai alat bantu. Peneliti juga menggunakan alat perekam suara dan catatan lapangan untuk memastikan keakuratan data. Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode, serta pengecekan data oleh informan (member check). Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Dengan metode ini, peneliti berupaya menggambarkan secara utuh realitas pelaksanaan layanan ABK di sekolah, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang perbaikan berdasarkan kondisi empiris di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

SMP Negeri 2 Lamongan merupakan salah satu sekolah menengah pertama unggulan di Kabupaten Lamongan, yang berlokasi di Jl. Veteran No. 3, Kelurahan Banjar Anyar, Kecamatan Lamongan. Sekolah ini dikenal memiliki reputasi baik dalam bidang akademik maupun non-akademik serta didukung dengan sarana prasarana yang relatif lengkap. Dalam rangka mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, SMPN 2 Lamongan telah ditetapkan sebagai salah satu sekolah inklusi yang menerima dan melayani peserta didik berkebutuhan khusus (ABK) untuk belajar bersama siswa reguler dalam satu lingkungan pendidikan.

Tabel 1 Data peserta didik SMPN 2 Lamongan

Kelas	Jumlah Pendaftar	Jumlah Siswa	Jumlah Siswi	Jumlah	Jumlah Berkebutuhan Khusus
VII	690	193	146	339	1
VIII		166	173	339	2
IX		164	175	339	1
TOTAL		494	523	1017	6

Sumber : Data pokok pendidikan SMPN 2 Lamongan

Visi sekolah adalah “Mewujudkan peserta didik yang cerdas, terampil, berkarakter, dan berwawasan lingkungan.” Visi ini dijabarkan dalam beberapa misi, antara lain: meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi semua siswa, serta menanamkan nilai-nilai karakter seperti toleransi, kedisiplinan, dan kepedulian sosial. Komitmen terhadap pendidikan inklusif juga tercermin dari upaya sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang ramah anak dan menghargai keberagaman.

Secara fisik, SMPN 2 Lamongan memiliki fasilitas seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, ruang keterampilan, dan lapangan olahraga. Beberapa fasilitas telah mulai disesuaikan untuk mendukung kebutuhan ABK, meskipun belum sepenuhnya memenuhi standar aksesibilitas yang ideal, seperti ramp, toilet disabilitas, dan ruang terapi. Dalam hal sumber daya manusia, sekolah memiliki sejumlah guru yang telah mengikuti pelatihan pendidikan inklusif serta guru pendamping khusus (GPK), meskipun jumlahnya masih terbatas. Jumlah peserta didik mencapai lebih dari 900 siswa, termasuk di dalamnya siswa ABK dengan berbagai jenis kebutuhan khusus. Sekolah terus berupaya untuk mengembangkan pendekatan pembelajaran yang adaptif dan kolaboratif demi mewujudkan layanan pendidikan yang adil dan setara bagi seluruh peserta didik.

Pelaksanaan Layanan Pendidikan ABK di SMP Negeri 2 Lamongan

Layanan adalah tindakan atau kegiatan yang dilakukan seseorang atau organisasi guna membantu orang lain. Layanan pendidikan mengacu pada kegiatan apapun yang ada di sekolah, baik formal maupun non-formal yang bertujuan untuk memfasilitasi proses belajar mengajar. Dalam layanan pendidikan bisa mencakup berbagai kegiatan seperti pengajaran di kelas, bimbingan belajar dan pelatihan keterampilan. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) membutuhkan pelayanan khusus dibandingkan dengan siswa reguler atau anak normal

Modifikasi kurikulum merupakan bentuk penyesuaian rancangan serta pelaksanaan pendidikan yang dilakukan oleh sekolah guna memenuhi kebutuhan, kondisi, dan karakteristik peserta didik yang beragam di lingkungan kelembagaan pendidikan. Di SMP Negeri 2 Lamongan, modifikasi kurikulum tidak hanya mengacu pada tuntutan administratif, namun lebih menekankan pada relevansi serta fleksibilitas terhadap kebutuhan individu, khususnya pada peserta didik berkebutuhan khusus (ABK) yang memerlukan adaptasi pembelajaran secara lebih personal dan inklusif. Implementasi modifikasi kurikulum ini tercermin dari realitas bahwa sekolah harus terus melakukan pembaruan dan penyesuaian agar seluruh

siswa dapat memperoleh hak belajar yang setara, efektif, serta bermakna sesuai dengan perkembangan kebijakan pendidikan nasional.

“di sekolah ini menggunakan kurikulum merdeka mbak, kalo kemarin kan masih bertahap tapi sekarang kelas VII sampai IX sudah sama semua sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan” .(Yayuk, Wawancara, 05 Mei 2025)

Berdasarkan data wawancara diatas, menggambarkan adanya proses adaptasi yang secara berkelanjutan dilakukan oleh sekolah demi mewujudkan pendidikan yang lebih inklusif, adil, dan merata bagi semua peserta didik. Implementasi Kurikulum Merdeka secara menyeluruh pada setiap kelas menandakan kesiapan lembaga sekolah dalam menghadapi dinamika serta kompleksitas kebutuhan belajar, khususnya untuk ABK. Adaptasi kurikulum yang dilakukan bukan hanya sebatas kebijakan administratif, namun juga sebagai bentuk komitmen dan kesadaran sekolah dalam menegakkan inklusivitas pendidikan yang berbasis keadilan dan keberagaman. Proses modifikasi kurikulum yang telah dilaksanakan menjadi bukti konkret bahwa prinsip diferensiasi dan fleksibilitas benar-benar diterapkan di lingkungan sekolah.

“sebelum merancang rpp harus dipelajari dulu capaian pembelajarannya mbak, setelah itu merancang tujuan pembelajaran nah tujuan pembelajaran ini nantinya dikembangkannya menjadi ATP yang digunakan pada satu kali pertemuan” . (Maria, Wawancara, 08 Mei 2025)

Hasil wawancara mengenai proses pembelajaran kurikulum merdeka di SMP Negeri 2 Lamongan menunjukkan bahwa identifikasi capaian pembelajaran merupakan langkah awal yang wajib dilakukan sebelum merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Selain itu perumusan tujuan pembelajaran menjadi tahap esensial setelah capaian pembelajaran dipahami. Tujuan pembelajaran yang telah dirancang dikembangkan lebih lanjut menjadi Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) yang dipakai dalam satu kali pertemuan dalam pembelajaran.



Gambar 1. Proses Perencanaan Pembelajaran ABK

Berdasarkan temuan SMP Negeri 2 Lamongan memiliki Rancangan Rencana Pembelajaran Individu (RPI). Penyusunan Rencana Pembelajaran Individual (RPI) bagi guru mata pelajaran dilakukan melalui kerja sama antara guru mata pelajaran dengan guru pendamping. RPI yang telah disusun tidak senantiasa digunakan dalam setiap pertemuan pembelajaran namun penerapan RPI bersifat situasional, yakni hanya dilakukan apabila muncul hambatan atau kebutuhan khusus dalam proses belajar siswa berkebutuhan khusus dalam proses belajar.

SMP Negeri 2 Lamongan memiliki Rancangan Rencana Pembelajaran Individu (RPI). Penyusunan Rencana Pembelajaran Individual (RPI) bagi guru mata pelajaran dilakukan melalui kerja sama antara guru mata pelajaran dengan guru pendamping. RPI yang telah disusun tidak senantiasa digunakan dalam setiap pertemuan pembelajaran namun penerapan RPI bersifat situasional, yakni hanya dilakukan apabila muncul hambatan atau kebutuhan khusus dalam proses belajar siswa berkebutuhan khusus dalam proses belajar.

Hasil temuan mengenai strategi pembelajaran guru SMP Negeri 2 lamongan menyampaikan materi secara menyeluruh kepada semua siswa tanpa membedakan siswa reguler dan siswa dengan kebutuhan khusus (ABK) pada awal pembelajaran. Setelah penjelasan umum diberikan, guru secara khusus mendekati siswa ABK untuk memberikan bimbingan individual. Guru juga memberikan arahan tambahan dan penjelasan khusus untuk memastikan bahwa siswa ABK memahami materi dengan baik dan tidak mengalami kesulitan dalam pelaksanaan pembelajaran. Pendekatan diferensiasi ini memungkinkan setiap siswa belajar sesuai dengan kemampuannya. Strategi mengajar merupakan cara pendidik untuk memberikan pengajaran yang menyenangkan sehingga peserta didik dapat memahami materi dengan mudah.

Sebelum melaksanakan pembelajaran setiap guru harus menyusun perencanaan pembelajaran yang biasa disebut RPP. Perencanaan pembelajaran merupakan serangkaian upaya yang dilakukan oleh pendidik di SMP Negeri 2 Lamongan dalam menyiapkan langkah-langkah sistematis guna memastikan kegiatan belajar mengajar berjalan optimal, khususnya dalam konteks peserta didik berkebutuhan khusus (ABK). Berdasarkan temuan di lapangan, perencanaan pembelajaran bagi siswa ABK tidak hanya sekadar merancang perangkat mengajar secara umum, namun terdapat sentuhan penyesuaian agar lingkungan dan

proses belajar dapat diakses dan sesuai dengan karakteristik siswa ABK. Dalam penyusunan perencanaan pembelajaran ABK di SMP Negeri 2 Lamongan, upaya yang dilakukan oleh pendidik, salah satunya adalah melakukan adaptasi terhadap RPP sehingga menjadi lebih kontekstual dan aplikatif bagi siswa ABK.

“Misalnya, dalam indikator pencapaian kompetensi, saya menyesuaikan kondisi siswa agar lebih realistis. Kalau untuk siswa reguler indikatornya memahami dan menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, maka untuk ABK saya turunkan menjadi mengenal atau menyebutkan nilai-nilai Pancasila saja” . (Maria, Wawancara, 08 Mei 2025)

Penyesuaian indikator bukan sekadar penyederhanaan, melainkan wujud nyata perhatian dan strategi adaptif agar setiap siswa, tanpa terkecuali, memperoleh pengalaman belajar yang relevan dan bermakna. Dengan demikian, perencanaan pembelajaran di SMP Negeri 2 Lamongan sangat memperhatikan kebutuhan riil siswa. Selain itu peneliti melakukan observasi terkait adaptasi RPP juga memberikan dampak psikologis positif bagi siswa ABK. Dengan penyesuaian target pembelajaran yang selaras dengan kemampuan mereka, proses belajar menjadi lebih inklusif dan memberikan ruang bagi tumbuhnya motivasi serta kepercayaan diri.

Pengamatan terhadap praktik penyusunan RPP di SMP Negeri 2 Lamongan juga menunjukkan bahwa perencanaan pembelajaran tidak hanya berfokus pada pembuatan dokumen, tetapi juga pada implementasi nyata di kelas. Prinsip inklusivitas selalu dijaga oleh guru, di mana setiap strategi pembelajaran yang dipilih diawali dengan analisis kebutuhan siswa melalui observasi, refleksi kelas, hingga diskusi intensif antar guru dalam forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) internal. Peneliti menemukan bahwa siswa SMP Negeri 2 Lamongan lebih menyukai metode pembelajaran diskusi dibandingkan metode ceramah karena dapat memberikan peluang interaksi antar teman saat mengerjakan tugas. Sedangkan metode ceramah cenderung menurunkan antusiasme belajar siswa karena dianggap membosankan dan membuat mengantuk.

Guru di SMP Negeri 2 Lamongan lebih sering menerapkan metode pembelajaran diskusi dan tanya jawab dalam proses pembelajaran di kelas karena keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran meningkat melalui metode diskusi dan tanya jawab. Selain berfungsi sebagai perantara komunikasi dalam kegiatan belajar mengajar, media pembelajaran baik berupa media visual, audio, audiovisual, maupun berbasis digital merupakan alat, sarana, atau materi yang digunakan pendidik untuk menyampaikan materi pelajaran guna membantu peserta didik memahami konsep yang diajarkan. Selain itu dalam penggunaan media pembelajaran yang tidak digunakan setiap hari karena disesuaikan dengan materi yang diajarkan. Siswa paling menyukai media audio visual untuk pembelajaran, seperti pemutaran video di LCD. Preferensi siswa terhadap media pembelajaran menunjukkan kecenderungan pada media yang interaktif dan menarik secara visual dan auditori. Media pembelajaran inklusif merupakan sarana yang dikembangkan dan digunakan di lingkungan pendidikan guna memastikan seluruh peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK) dapat terlibat secara aktif dan memperoleh hak belajar yang setara.

Media pembelajaran inklusif tidak sekadar sebagai alat bantu pembelajaran, melainkan juga sebagai bentuk konkret dari adaptasi lingkungan belajar yang menyesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan setiap siswa. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lapangan, media pembelajaran inklusif diartikan sebagai segala bentuk media yang mampu diterima, diakses, dan dipahami seluruh siswa tanpa terkecuali, baik anak berkebutuhan khusus maupun siswa reguler.

“media yang saya berikan biasanya sama antara anak normal dengan ABK karena saya membuat media yang mudah dipahami dan sederhana supaya anak-anak bisa menggunakan dan memahami materi dengan mudah seperti materi demokrasi kelas 7 saya membuat bilik suara dan perlengkapan lain sehingga anak-anak bisa tau bagaimana urutan dan manfaat demokrasi” . (Maria, Wawancara, 08 Mei 2025)

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh Ibu Maria, baik peserta didik dari jalur reguler maupun siswa dengan kebutuhan khusus (ABK) merasakan manfaat dari penggunaan media pembelajaran yang sederhana dan mudah dipahami. Dapat disimpulkan bahwa integrasi berbagai alat simulasi pemilu seperti bilik suara, surat suara, kotak suara, dan perlengkapan lainnya ke dalam pembelajaran materi demokrasi di kelas VII mampu membantu siswa memahami konsep, tahapan, dan kelebihan sistem demokrasi secara lebih konkret. Melalui keterlibatan langsung dalam simulasi tersebut, siswa tidak hanya memperoleh pemahaman secara teoritis, tetapi juga mengalami secara langsung bagaimana mekanisme demokrasi berjalan, pentingnya keterlibatan individu dalam proses pengambilan keputusan, serta menanamkan nilai-nilai utama demokrasi seperti keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab, baik dalam konteks kehidupan di sekolah maupun di lingkungan masyarakat secara luas.

” jumlah guru pendamping disini cuma 2 mbak saya sama Endang, untuk pendampingan saat pembelajaran tidak dilakukan setiap saat karena kurangnya GPK dibandingkan jumlah kelas yang ada siswa khususnya” . (Henny, Wawancara, 08 Mei 2025)

secara verbal maupun visual agar dapat dipahami oleh siswa ABK, disertai dengan pendampingan individual yang dilakukan oleh guru pendamping untuk membantu siswa berkebutuhan khusus memahami materi, menyelesaikan tugas, serta tetap fokus dalam mengikuti Hasil wawancara menunjukkan bahwa jumlah guru pendamping khusus (GPK) di sekolah ini hanya tersedia dua orang sehingga belum proporsional dengan jumlah kelas dan siswa berkebutuhan khusus yang ada. Pendampingan pembelajaran oleh GPK di SMP Negeri 2 Lamongan tidak dapat dilakukan secara optimal pada setiap saat karena keterbatasan jumlah tenaga pendamping namun hanya beberapa waktu saat guru mata pelajaran membutuhkan bantuan. Kekurangan jumlah GPK berdampak pada tidak terlaksananya pendampingan individu secara intensif kepada seluruh siswa berkebutuhan khusus di tiap kelas.

Temuan dalam penelitian ini terkait keberadaan siswa reguler yang lebih tanggap sangat membantu dalam proses pembelajaran, terutama bagi siswa yang membutuhkan waktu dan dukungan tambahan. Hal ini menjadi bukti bahwa peer support system dapat diintegrasikan secara sistematis di dalam kelas, dengan pendampingan dan pengaturan yang dilakukan langsung oleh GPK untuk memastikan adanya transfer pengetahuan dan motivasi antar siswa. Strategi pemanfaatan siswa reguler tidak hanya mendorong terciptanya lingkungan kelas yang inklusif, tetapi juga memperkuat rasa toleransi, empati, dan solidaritas di antara siswa.

Siswa yang secara akademik lebih cepat tanggap diberikan kepercayaan dan peran tambahan untuk menjadi pendukung teman sebaya mereka, sehingga secara tidak langsung turut berkontribusi pada perkembangan sosial dan emosional seluruh peserta didik di dalam kelas. Selain itu, pengaturan posisi duduk yang dinamis dilakukan guna menjaga keseimbangan interaksi sosial dan menghindari kejenuhan, sehingga siswa yang menjadi peer supporter atau pendamping tetap termotivasi dan siswa yang didampingi memperoleh dukungan yang optimal. Pembelajaran di sekolah inklusi harus menyenangkan dan memberikan kenyamanan agar peserta didik tidak merasa tertekan, salah satu upaya yang dilakukan dengan setting kelas.

Sistem pembagian kelas di sekolah menggunakan hasil tes IQ sebagai dasar utama pengelompokan peserta didik. Peserta didik berkebutuhan khusus (ABK) penyandang disabilitas fisik dapat ditempatkan pada kelas yang sesuai dengan kemampuannya berdasarkan hasil tes IQ-nya. Tata ruang kelas inklusif diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih ramah, inklusif, dan mendukung di mana setiap siswa dapat mencapai potensi penuh mereka berdasarkan kebutuhan dan kemampuan unik mereka.

Hasil observasi terhadap pelaksanaan pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus kelas VII pada mata pelajaran PPKn di sekolah inklusi SMP Negeri 2 Lamongan menunjukkan bahwa proses pembelajaran telah dilaksanakan secara menyeluruh mulai awal hingga akhir. Pada kegiatan awal pembelajaran dilaksanakan selama durasi 5 sampai 10 menit secara terstruktur sebelum memasuki inti pembelajaran, di mana guru kelas secara konsisten memulai kegiatan dengan mengucapkan salam yang kemudian dijawab secara serempak oleh seluruh siswa sebagai bentuk pembentukan suasana kelas yang positif dan penuh kedisiplinan. Setelah itu, guru melakukan pengecekan buku pelajaran PPKn sebagai bagian dari kesiapan siswa dalam mengikuti kegiatan belajar, sementara guru pendamping secara khusus memberikan perhatian kepada siswa berkebutuhan khusus dengan memeriksa secara langsung kelengkapan buku pelajaran PPKn mereka sebelum pembelajaran berlangsung, guna memastikan bahwa siswa berkebutuhan khusus mendapatkan dukungan yang tepat sejak awal pembelajaran agar dapat berpartisipasi secara optimal dalam proses belajar bersama teman-teman di kelas reguler.

Rangkaian kegiatan inti pembelajaran berlangsung dengan penerapan berbagai strategi dan media pembelajaran yang variatif seperti diskusi kelompok, tanya jawab, pemanfaatan media visual, serta pemberian tugas kontekstual yang relevan dengan materi PPKn, sehingga menciptakan suasana belajar yang aktif dan menarik bagi seluruh siswa. Selama kegiatan inti, guru juga memberikan penyesuaian instruksi alur pembelajaran. Guru juga secara konsisten memberikan penguatan positif dalam bentuk pujian, motivasi, dan penghargaan sederhana atas partisipasi maupun pencapaian siswa ABK, sebagai bentuk dukungan emosional dan psikologis yang sangat penting dalam membangun kepercayaan diri, kemandirian, dan keterlibatan mereka secara aktif dalam proses belajar mengajar di lingkungan kelas inklusi. Kegiatan inti dilakukan selama 60 menit.

Pada tahap akhir pembelajaran, guru mengajak seluruh peserta didik untuk melakukan refleksi terhadap materi yang telah mereka pelajari. Refleksi ini dilakukan melalui berbagai cara, seperti mengajukan pertanyaan pemantik untuk merangsang pemikiran kritis, meminta siswa menyampaikan pemahaman mereka secara lisan, hingga menyusun ringkasan pembelajaran secara bersama-sama. Tujuannya adalah untuk memperkuat daya ingat siswa dan memperdalam pemahaman mereka terhadap materi yang telah dibahas. Selain itu, guru memberikan umpan balik yang bersifat membangun terhadap hasil kerja siswa. Umpan balik ini juga diberikan secara khusus kepada siswa berkebutuhan khusus (ABK) dengan pendekatan yang lebih empatik, personal, dan disesuaikan dengan kapasitas serta karakteristik masing-masing individu. Menjelang penutupan sesi pembelajaran, guru juga menyampaikan pesan moral

yang relevan dengan tema dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Nilai-nilai seperti pentingnya bersikap demokratis, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi toleransi ditekankan guna memperkaya dimensi kognitif siswa, sekaligus mendukung pembentukan karakter yang kuat dan berintegritas dalam kehidupan sosial mereka di sekolah maupun di lingkungan masyarakat.

Proses pembelajaran di SMP Negeri 2 Lamongan berjalan secara inklusif dengan menjamin partisipasi aktif siswa berkebutuhan khusus dalam kelas inklusi, melalui penerapan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, penggunaan strategi diferensiasi, serta dukungan dari guru pendamping yang secara aktif memberikan asistensi sesuai dengan kebutuhan individu siswa ABK. Lingkungan belajar yang dibangun pun bersifat terbuka, menghargai perbedaan, dan mendorong kolaborasi antar siswa, sehingga memungkinkan terciptanya interaksi sosial yang sehat serta kesempatan yang setara bagi seluruh siswa untuk berkontribusi dalam kegiatan belajar, baik secara akademik maupun sosial, sebagai wujud nyata dari praktik pendidikan inklusif yang menjunjung nilai-nilai keadilan dan kesetaraan di sekolah.

Proses Penilaian dan Pemantauan Kemajuan ABK

SMP Negeri 2 Lamongan telah menerapkan standar kelulusan yang seragam antara ABK dan peserta didik reguler, namun tetap memberikan ruang adaptasi yang memungkinkan ABK untuk mencapai target nilai minimum melalui penyesuaian pada aspek-aspek soal yang mereka kerjakan. Penyesuaian ini dilakukan agar ABK tidak merasa terbebani secara berlebihan namun tetap berada dalam koridor penilaian yang adil dan proporsional. Setiap jenjang memiliki perbedaan nilai minimum karena menyesuaikan dengan kemampuan awal peserta didik. Untuk mendapatkan nilai dan memenuhi standar kompetensi lulusan maka dilaksanakan evaluasi pendidikan biasanya dengan mengadakan ujian, sehingga sekolah bisa mengetahui mutu peserta didiknya.

“KKM bisa diturunkan dan SKL juga bisa dirubah mbak, apabila kondisi anak berkebutuhan khusus masuk ke dalam kategori parah, oleh karena itu saat PPDB kita lakukan pemilahan supaya kita mengetahui apakah perlu adanya penyusunan ulang KKM dan SKL khusus untuk anak disabilitas” . (Endang, Wawancara, 05 Mei 2025)

Penurunan KKM dan perubahan SKL bagi ABK merupakan langkah yang dilakukan oleh SMP Negeri 2 Lamongan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan individual peserta didik dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kemampuan kognitif, kondisi emosional, hambatan fisik atau sensorik, serta gaya belajar yang berbeda-beda, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan lebih inklusif dan memungkinkan ABK untuk mencapai kompetensi yang sesuai dengan potensi dan perkembangan mereka tanpa tekanan yang berlebihan, di mana keputusan untuk menurunkan KKM ini harus didasarkan pada evaluasi menyeluruh yang melibatkan guru, orang tua, dan tenaga pendidik khusus agar tetap menjamin kualitas pembelajaran serta memberikan kesempatan bagi ABK untuk berkembang secara optimal dalam lingkungan yang suportif dan adaptif.

“Biasanya kita adakan remidi mbak tapi dengan soal yang lebih sedikit dan kadang soal yang sama tapi kami kurangi namun kadang juga kami suruh membawa pulang untuk dikerjakan di rumah boleh melihat buku atau internet nilai rapot juga tidak selalu di ambil dari nilai asli tapi dikontrol dulu di ambil rata-ratanya bisa dari nilai tugas sehari-hari atau dari kehadiran dan keaktifan siswa” . (Heny, Wawancara, 08 Mei 2025)

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan penilaian di lingkungan pendidikan bagi ABK sangat mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan anak, sekaligus tetap mengedepankan prinsip keadilan sehingga setiap anak mendapatkan ruang untuk berkembang sesuai potensi masing-masing. Untuk memastikan bahwa setiap siswa berkebutuhan khusus (ABK) memiliki kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan dan kemajuan belajarnya, strategi modifikasi penilaian dan akomodasi ujian digunakan untuk menilai dan memantau kemajuan ABK di SMP Negeri 2 Lamongan.

Komitmen sekolah dalam menyediakan aksesibilitas optimal bagi ABK agar tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai. Berdasarkan temuan wawancara menunjukkan bahwa modifikasi proses ujian merupakan unsur utama dari akomodasi penilaian yang dilakukan sekolah. Penyesuaian dilakukan secara personal berdasarkan kebutuhan masing-masing ABK. Hal ini mencakup pemberian waktu ujian tambahan untuk siswa yang membutuhkan waktu lebih lama dalam memahami dan mengerjakan soal, penyediaan media visual seperti gambar untuk membantu siswa dengan hambatan kognitif atau komunikasi, serta pendampingan langsung dari guru pendamping ketika siswa menunjukkan kesulitan tertentu dalam menyelesaikan tugas ujian. Dengan pendekatan ini, proses penilaian tidak lagi bersifat seragam, melainkan menjadi refleksi dari keberagaman cara belajar dan kemampuan yang ada pada setiap ABK.

Pelaksanaan pendidikan bagi ABK di SMPN 2 Lamongan tidak sekadar bertumpu pada kemampuan kognitif semata, namun menuntut penilaian sikap, integritas, serta keterampilan sosial sebagai bagian integral dari proses pembelajaran. Kompetensi yang dihasilkan melalui konsep Standar Kompetensi

Lulusan (SKL) menuntut adanya penyesuaian dalam metode pembelajaran maupun evaluasi, agar siswa berkebutuhan khusus dapat mengembangkan potensi terbaiknya. Integrasi nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam penilaian pun menjadi instrumen utama dalam membangun kepribadian siswa agar mampu beradaptasi dan bersosialisasi secara efektif di lingkungan sekolah maupun masyarakat luas.

Tidak ada ABK yang tertinggal di kelas namun terdapat kompetensi minimal akademik yang harus dikuasai oleh ABK yakni kemampuan dasar dalam menulis, menghitung serta menunjukkan kemampuan dalam keterampilan atau kemandirian selama di sekolah. GPK berfungsi sebagai jembatan antara kebutuhan individu ABK dan kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh sekolah dengan cara memberikan pendampingan dalam proses pembelajaran, mengidentifikasi kesulitan yang dihadapi siswa, serta membantu guru kelas dalam merancang strategi asesmen yang lebih inklusif dan fleksibel, sehingga penilaian yang diberikan tidak hanya berdasarkan standar kurikulum umum yang sering kali kurang sesuai dengan kondisi ABK, tetapi juga berdasarkan perkembangan yang bersifat individual.

“Saya tidak ikut memberi nilai mbak tapi saya hanya ikut di proses penilaiannya saya membantu guru mapel dalam membuat soal ujian biasanya saya juga mendampingi anak-anak yang kesulitan mengerjakan ujian” . (Heny, Wawancara, 08 Mei 2025)

GPK terlibat langsung dalam mendukung proses ujian, namun keputusan nilai tetap menjadi tanggung jawab guru mata pelajaran atau penguji yang bertugas menilai berdasarkan objektivitas dan standar yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan individu ABK. Pendampingan GPK hanya sebatas membantu siswa memahami soal, menyalin jawaban apabila siswa mengalami kesulitan motorik, dan memberikan dukungan moral agar siswa merasa lebih percaya diri dan tidak mengalami kecemasan berlebihan saat ujian. GPK juga membantu guru mata pelajaran dalam proses penyusunan soal.

Program Pengembangan Bakat dan Minat ABK

Layanan Penunjang Inklusi di SMP Negeri 2 Lamongan merupakan bentuk nyata komitmen sekolah dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, akomodatif, serta responsif terhadap kebutuhan khusus peserta didik berkebutuhan khusus (ABK). Salah satu bentuk layanan penunjang inklusi yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler khusus untuk ABK di SMP Negeri 2 Lamongan. Program Pengembangan Bakat dan Minat Anak Berkebutuhan Khusus ini dirancang secara sistematis dan terstruktur dengan tujuan memberikan peluang seluas-luasnya kepada setiap siswa ABK untuk menggali serta mengembangkan potensi diri mereka secara optimal, dengan memperhatikan karakteristik, minat, dan kemampuan individual masing-masing. Program ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek akademik semata, melainkan juga meliputi berbagai aspek lain yang mendukung perkembangan holistik siswa berkebutuhan khusus.

“Esktra disekolah ini ada wajib ada minat wajib itu seperti pramuka tahfidz quran yang minat ada olahraga kesenian banyak itu bebas mau pilih esktra yang mana pokoknya disesuaikan dengan kondisi siswa biasanya guru mengarahkan ABK untuk memilihnya karna tidak mungkin mbak anak punya penyakit lumpuh mengikuti ekstra voly” . (Heny, Wawancara, 08 Mei 2025)

Program pengembangan bakat dan minat yang ada di SMP Negeri 2 Lamongan terbagi menjadi dua yaitu ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler minat. Kegiatan ekstrakurikuler wajib seperti Pramuka, Pendidikan Kepemimpinan (OSIS), bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, dan nasionalisme pada siswa. Sedangkan ekstrakurikuler minat memungkinkan siswa untuk memilih kegiatan yang sesuai dengan bakat dan minatnya, seperti musik, olahraga, jurnalistik, robotika, atau kewirausahaan, sehingga mereka dapat mengembangkan potensi individu mereka secara lebih optimal dalam lingkungan yang mendukung kreativitas dan inovasi, yang pada akhirnya tidak hanya meningkatkan pengalaman belajar di sekolah tetapi juga mempersiapkan mereka untuk menghadapi dunia kerja atau pendidikan tinggi dengan lebih baik.

“pemilihan ekstrakurikuler dilakukan saat awal masuk kelas 7 tapi untuk kelas 8 dan 9 bisa menambah atau ganti esktra pada hanya saat kenaikan kelas mbak” . (Yayuk, Wawancara, 05 Mei 2025)

Pemilihan kegiatan ekstrakurikuler di SMP Negeri 2 Lamongan secara formal dilaksanakan pada awal siswa masuk kelas 7 sebagai bagian dari proses awal pengembangan potensi nonakademik, di mana seluruh siswa diberikan kebebasan untuk memilih kegiatan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Sementara bagi siswa kelas 8 dan 9, sekolah memberikan kesempatan yang sama untuk menambah atau mengganti kegiatan ekstrakurikuler yang telah diikuti sebelumnya pada saat masa transisi kenaikan kelas, sehingga mekanisme pemilihan dan perubahan kegiatan ekstrakurikuler tersebut diatur secara periodik dan sistematis sesuai dengan status kenaikan kelas siswa, yang mencerminkan fleksibilitas kebijakan sekolah dalam mendukung dinamika perkembangan minat, kebutuhan, dan potensi siswa secara individual. Ditemukan keberagaman potensi dan kemampuan pada anak berkebutuhan khusus (ABK) di SMP Negeri 2 Lamongan. Dampak pengembangan bakat terhadap keberhasilan ABK di SMP Negeri 2 Lamongan sangat baik, karena dengan pendekatan yang tepat, teknik pembelajaran yang adaptif, serta

pendampingan banyak pihak, mereka dapat memaksimalkan potensi ABK dalam berbagai bidang sehingga ABK bisa mengembangkan bakatnya diluar sekolah.

Pelaksanaan ekstrakurikuler ABK di SMP Negeri 2 Lamongan tetap didampingi dan di awasi oleh GPK namun tidak efektif. Dalam situasi di mana jumlah GPK yang tersedia tidak sebanding dengan kebutuhan pendampingan dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler, banyak ABK yang harus beradaptasi sendiri tanpa dukungan yang memadai, yang pada akhirnya dapat menghambat partisipasi mereka. Hal ini dikarenakan jumlah pendamping yang tersedia lebih sedikit dibandingkan jenis kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh ABK. Akibatnya, tidak semua siswa dapat memperoleh pendampingan terbaik saat mengikuti kegiatan tambahan.

“iya ada mbak program pengembangan keterampilan seperti pelatihan kebersihan diri manajemen waktu mengelola barang pribadi dan keselamatan diri ada juga latihan vokasional atau wirausaha jadi anak anak mengikuti kegiatan pelatihan memasak menjahit berkebun dan berjualan” . (Endang, Wawancara, 05 Mei 2025)

SMPN 2 Lamongan telah menyelenggarakan berbagai program pengembangan keterampilan yang dirancang untuk membantu siswa, terutama Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), dalam meningkatkan kemandirian serta kesiapan mereka menghadapi kehidupan sehari-hari. Program ini mencakup sejumlah topik penting, termasuk manajemen waktu, yang mengajarkan cara mengatur jadwal harian, mengalokasikan waktu untuk belajar dan istirahat, dan mengenali nilai ketepatan waktu dalam kehidupan sehari-hari, serta pelatihan kebersihan pribadi yang mengajarkan siswa cara menjaga kebersihan tubuh, menggosok gigi, mencuci tangan dengan benar, dan berpakaian rapi. Sementara dalam program mengelola barang pribadi, siswa diajarkan cara merapikan dan menyusun perlengkapan sekolah serta barang-barang pribadi agar lebih teratur dan mudah ditemukan. Di samping itu, terdapat pula pelatihan keselamatan diri, yang membekali siswa dengan keterampilan menghadapi situasi darurat, seperti memahami rambu-rambu keselamatan, mengenali orang asing, serta menjaga diri saat berada di tempat umum.

“program ini dilakukan setiap tiga bulan sekali biasanya setelah pelaksanaan ujian tengah semester atau akhir semester mbak setelah itu kan tidak ada kegiatan pembelajaran karena bapak ibu guru mata pelajaran mengoreksi hasil ujian nah itu kita gunakan untuk pelaksanaan program diri ABK untuk lama waktunya hanya sekitar dua jam” . (Endang, Wawancara, 05 Mei 2025)

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara yang dilakukan mengenai pelaksanaan program bina diri di SMPN 2 Lamongan, diketahui bahwa program ini dijadwalkan setiap tiga bulan sekali, yang biasanya dilaksanakan setelah ujian tengah semester (UTS) atau ujian akhir semester (UAS), karena pada periode tersebut tidak terdapat kegiatan pembelajaran aktif karena para guru mata pelajaran sedang disibukkan dengan proses pengoreksian hasil ujian. Sehingga waktu yang tersedia dimanfaatkan secara optimal untuk mengadakan program bina diri khusus bagi ABK. Program ini berlangsung selama sekitar dua jam pada setiap kegiatan. Meskipun program ini tidak dilaksanakan setiap minggu, perencanaan yang matang dan pemilihan waktu yang strategis setelah ujian semester membuat kegiatan ini dapat berjalan secara efektif tanpa mengganggu jalannya kegiatan akademik maupun non-akademik lainnya.

Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan ABK

Hasil observasi dan menunjukkan bahwa belum lengkapnya prasarana pendidikan bagi ABK di SMPN 2 Lamongan, seperti tidak tersedianya pegangan tangan di berbagai area sekolah, ketiadaan lift untuk memudahkan mobilitas siswa dengan keterbatasan fisik, serta minimnya jalur landai (ramp) yang sesuai dengan standar aksesibilitas, hal ini dapat menjadi kendala utama dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan ramah bagi seluruh peserta didik, di mana kondisi ini semakin diperparah dengan kurangnya fasilitas penunjang lainnya, seperti toilet yang ramah disabilitas, papan petunjuk dengan huruf braille bagi siswa tunanetra. Selain itu diperlukan juga pengadaan alat bantu belajar yang sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-masing ABK, seperti perangkat komunikasi alternatif, buku braille, alat bantu dengar, perangkat teknologi adaptif, serta sumber daya lain yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Masih kurangnya pemenuhan hak atas prasarana sekolah bagi ABK di SMPN 2 Lamongan yang dapat menjadi kendala dalam mewujudkan pendidikan inklusif yang optimal. Sekolah hanya pernah memberikan alat bantu berupa kacamata dalam satu kesempatan ketika mendatangkan tim pemeriksa mata dari KMU, yang saat itu melakukan tes mata secara gratis untuk seluruh siswa tanpa terkecuali.

SMP Negeri 2 Lamongan mendapatkan bantuan sarana yang ditujukan untuk siswa berkebutuhan khusus yaitu kursi roda tapi sarana tersebut jarang terpakai karena latar belakang siswa berkebutuhan khusus belum ada yang membutuhkan sarana tersebut. Selain dari inisiatif tersebut, hingga kini belum ada upaya lain dalam penyediaan alat bantu lain yang lebih spesifik sesuai kebutuhan ABK, seperti alat bantu dengar bagi siswa dengan gangguan pendengaran, papan komunikasi alternatif bagi siswa dengan hambatan bicara. Selain itu, sekolah juga belum memiliki media pembelajaran yang ramah bagi siswa tunanetra, seperti audio book dan buku dalam format braille, serta belum dilengkapi dengan sistem sensor

yang dapat membantu siswa dengan keterbatasan sensorik dalam beradaptasi dengan lingkungan sekolah, sehingga kondisi ini menunjukkan bahwa masih banyak fasilitas yang perlu disediakan agar hak ABK terhadap sarana dan prasarana pendidikan di SMPN 2 Lamongan yang layak dapat terpenuhi.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2020 menegaskan pentingnya akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas agar mereka memperoleh kesempatan pendidikan yang setara dan bebas dari diskriminasi. Akomodasi tersebut meliputi ketersediaan sarana dan prasarana, proses pembelajaran adaptif, serta dukungan psikososial sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Penelitian Zahro H (2024) turut memperkuat bahwa peserta didik dengan berbagai bentuk kebutuhan khusus, baik fisik, mental, sosial, maupun bakat istimewa, memerlukan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan hak asasi mereka.

Tujuan utama pendidikan inklusi adalah memberikan layanan optimal bagi ABK agar dapat mengikuti proses pembelajaran secara setara dan layak. Di SMP Negeri 2 Lamongan, implementasi pendidikan inklusi dilakukan sesuai Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diatur dalam PP No. 4 Tahun 2022 dan dikaitkan dengan empat prinsip Thomasevski: availability, accessibility, acceptability, dan adaptability. Dari sisi standar isi, modifikasi kurikulum dilakukan pada aspek tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan kemampuan kognitif, minat, dan hambatan belajar masing-masing ABK. Prinsip adaptability tercermin dari fleksibilitas kurikulum yang disesuaikan secara individual dan tidak disamakan dengan siswa reguler. Sementara itu, standar proses mencakup penyusunan RPP dan RPI yang adaptif, penggunaan media dan strategi pembelajaran yang variatif, serta pengaturan lingkungan belajar inklusif. Guru menerapkan pendekatan diferensiasi dengan menyesuaikan materi, metode, dan asesmen. Hal ini menunjukkan prinsip availability dan accessibility, di mana proses pembelajaran disusun secara terencana dan menjangkau semua siswa tanpa diskriminasi. Proses pembelajaran juga menekankan acceptability, yaitu penggunaan metode yang relevan seperti diskusi, demonstrasi, dan simulasi agar pengalaman belajar menjadi lebih bermakna.

Pada standar penilaian, penyesuaian dilakukan terhadap jumlah soal, tingkat kesulitan, durasi, hingga lokasi pelaksanaan asesmen. Guru juga bersikap reflektif dengan menyesuaikan metode penilaian berdasarkan perkembangan individual siswa. Ini menunjukkan pelaksanaan prinsip adaptability, yakni kemampuan guru menyesuaikan proses asesmen terhadap kondisi nyata ABK. Di sisi lain, standar sarana dan prasarana berkaitan langsung dengan prinsip availability, ditunjukkan melalui penyediaan ruang belajar inklusif, alat bantu belajar, dan kursi roda. Namun demikian, fasilitas seperti jalur landai, toilet aksesibel, dan pegangan tangan masih belum tersedia, sehingga menjadi catatan untuk pengembangan ke depan. Secara keseluruhan, implementasi layanan pendidikan inklusi di SMP Negeri 2 Lamongan telah memenuhi keempat prinsip hak atas pendidikan versi Thomasevski. Sekolah menyediakan ruang, GPK, kurikulum adaptif, dan kegiatan bina diri (availability), menjamin akses materi, kegiatan kelas dan luar kelas oleh ABK (accessibility), memodifikasi pembelajaran sesuai kondisi siswa (acceptability dan adaptability), serta tidak membandingkan ABK dengan siswa reguler dalam sistem penilaian. Hal ini sejalan dengan temuan Wahyuni R (2024) yang menekankan bahwa model kelas heterogen memperkaya pengalaman belajar dan mendorong penyempurnaan layanan inklusi di masa depan.

SIMPULAN

Pelaksanaan layanan pendidikan bagi ABK di SMP Negeri 2 Lamongan memenuhi kriteria standar pendidikan inklusi nasional. Dimana sekolah menerapkan modifikasi kurikulum melalui Kurikulum Merdeka, yang menekankan fleksibilitas dan inklusivitas untuk memenuhi kebutuhan spesifik peserta didik berkebutuhan khusus. Proses layanan pendidikan telah dilakukan secara fleksibel dan menyesuaikan dengan kebutuhan individu pada setiap siswa. Strategi pembelajaran yang diterapkan oleh sekolah menggunakan pendekatan diferensiasi, dimana metode, media, materi, serta penilaian diadaptasi berdasarkan karakteristik masing-masing siswa. Guru dan Guru Pendamping Khusus memainkan peran sentral melalui pendampingan secara personal serta melakukan modifikasi kurikulum demi mendukung kebutuhan siswa berkebutuhan khusus. Pemenuhan hak ABK melalui layanan pendidikan di SMP Negeri 2 Lamongan sejalan dengan teori Thomasevski yaitu 4 prinsip utama dalam memenuhi hak ABK dalam pendidikan. Dari sisi hasil, pelaksanaan pemenuhan hak melalui pendidikan di SMP Negeri 2 Lamongan sudah dikatakan baik namun masih terdapat beberapa hak ABK yang belum terpenuhi yaitu pendampingan GPK yang intens serta sarana dan prasarana umum yang digunakan anak disabilitas.

REFERENSI

- Amka, et al. 2024. Teori Pemodelan sistem dalam pendidikan inklusif. Banjarmasin : Bravo press Indonesia.
- Arnida, Hijriati, Maulina, C. P., Fitria, A., & Fadila, N. (2024). Analisis Karakteristik Dan Aktivitas Belajar Anak Berkebutuhan Khusus (Tunarungu) Di Sekolah Slb- B Ypac Banda Aceh. Jurnal Warna. Vol 8(1), 1-10.

- Arriani, Farah et al. 2022. Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif. Jakarta : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk membantu sekolah dalam melaksanakan pendidikan inklusif.
- Depdiknas. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Dwika Setiawan, A., & Roro Nanik Setyowati, R. (2020). Pemenuhan Hak Peserta Didik Penyandang Disabilitas Di Sma Negeri 4 Sidoarjo (Studi Akses Pendidikan Program Sekolah Inklusi). *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 8(2).
- Joko, Yuwono. 2021. Buku Saku Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di Sekolah Dasar.
- Kasman, K. (2020). Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Education and Development*, Vol 8 (2), 515-750.
- Kebudayaan, M. P. dan. (2018). Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat.
- Menteri Pendidikan Nasional. 2009. Permendiknas No. 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan/atau Memiliki Bakat Istimewa Jakarta: Depdiknas
- Meyrena, Sukma Dwi. 2021. Evaluasi Pembelajaran Siswa Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusi. Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Mizana, Fathira. 2024. Proses Pembelajaran Inklusi Untuk Anak Berkebutuhan Khusus (Abk) Di Sdn Rumpet Aceh Besar. Skripsi. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh.
- Mumtaza, F. A., & Millanyani, H. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Urbans Travel. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*. Vol 7(2). 1645-1661.
- Nuriman et all. 2022. Memahami Analisis Kualitatif Memapar Teknik Memperlakukan Data Terorganisir, Terstruktur, dan Sistematis. Lhokseumawe : Tandaseru.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak. Lamongan: Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 33. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Generasi Kelima Tahun 2021-2025. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Ramadhan, Muhammad. 2021. Metode Penelitian. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Rusydi, M. 2017. Customer Excellence (N. Aedi (ed.)). Gosyen Publishing.
- Saputra, Muhammad Singgih. 2020. Gambaran Kemampuan Empati Pada Anak Gangguan Pemusatan Perhatian Hiperaktif (GPPH). *Jurnal Kognisia*. Vol 3 (2). Hal 8-10.
- Semiawan, C.R. & Mangungsong F. 2010. Keluarbiasaan Ganda. Jakarta : Kencana Prenada.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). Bandung: Alfabeta.
- Sutopo. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: UNS.
- Tomasevski, K. 2001. Education Primers No.3 : Human Rights Obligations : Making Education Available, Accessible, Acceptable and Adaptable. Swedish International Development Cooperation Agency 3. Hal 1-40.
- Tyas, Mulyaning Ni' mah. 2016. Analisis Faktor Penyebab Kesulitan Belajar Matematika Kelas Iv Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang. Skripsi. Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.